

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Al-Mundziriy, Hafizh. (1993). Sunan Abi Daud. Semarang: CV. AsySyifa’
- Amiruddin., dan Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Amrani, Hanafi., dan Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Andrisman, Tri. (2009). *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung
- Danil, Elwi. (2016). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya - Rajawali Pers*. Jakarta: Rajawali Pers
- Dedi., Siti Puadah., dan Ibnu Rusyd (2022). *Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Islam*. JUSTICES: Journal of Law 1(1), 38.
- Dianti, Flora. (2020, 18 Juni). *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi*. Diakses pada 6 September 2023, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturannya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a>
- Effendi, Tolib. (2019). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Fadhlika, Zulfa ‘Azzah. (2022, 3 Maret). *Mewujudkan Hukum yang Ideal Melalui Teori Lawrence M. Friedman*. Diakses pada 11 Juli 2024, dari <https://heylaw.id/blog/mewujudkan-hukum-yang-ideal-melalui-teori-lawrence-m-friedman>
- Finaka, Andrean W. (2019, 10 April). *Siapa Saja yang Termasuk ASN?*. Diakses pada 6 September 2023, dari <https://indonesiabaik.id/infografis/siapa-saja-yang-termasuk-asn>
- Haliman. (1968). *Hukuman Pidana Islam Menurut Ahli Sunnah Wal-Jama’ah*. Jakarta: Bulan Bintang
- Hamid, Abdul. (2020, 9 Oktober). *Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)*. Diakses pada 21 Maret 2022, dari <https://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/berita/pengembangan-sumber-daya-manusia-sdm>
- Harruma, Issha., dan Nibras Nada Nailufar. (2022, 18 Februari). *Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi*. Diakses pada 20 September 2023, dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/18/03150061/peran-masyarakat-dalam-pemberantasan-korupsi>
- Khairil, Muhammad. (2020, 6 Juli). *Teknik Analisis Data – Penelitian, Jenis, dan Tahapannya*. Diakses pada 15 Oktober 2022, dari

<https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/school-life/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-tahapannya>

- KPK (2019). *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*. 1(1), 2.
- Lamintang. (1984). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- LEMHANNAS (2023). *Tiga Upaya Pemerintah dalam Penanganan Korupsi*. 4(2), 1.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Grup
- Mustakid, Dodo. (2021). Tindak Pidana Korupsi dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Edu Law : Jurnal Of Islamic Law and Yurisprudance* 3(1), 18-19.
- M.Z, Ismail. (2021). EKSISTENSI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *Unizar Law Review* 4(1), 42.
- P. A. F, Lamintang. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ramadhan, Hilal Arya., Yusrizal., dan Fauzah Nur Aksa. (2021). TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH: Universitas Malikussaleh* 4(2), 25-27.
- Setiawan, Agus. (2016, 30 Maret). Pengertian Studi Kepustakaan. Diakses pada 29 September 2022, dari <https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html#:~:text=Studi%20kepustakaan%20adalah%20kegiatan%20untuk,%2C%20dan%20sumber%2Dsumber%20lain>
- Soekanto, Soerjono. (2022). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV Rajawali
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana 1*. Semarang:Yayasan Sudarto
- Sunda, Cliff M. (2017). *Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara*. 1(1), 2.
- Suyatno. (2023). KELEMAHAN TEORI SISTEM HUKUM MENURUT LAWRENCE M. FRIEDMAN DALAM HUKUM INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 199.
- Unknown. (2022, 31 Januari). *Statistik Penindakan*. Diakses pada 28 Mei 2022, dari <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan>
- Waani, Daniel Hendry Gilbert. (2015). *KEWENANGAN DAN PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI*. *Lex Crimen* 4(7), 74.

Waluyo, Bambang. (2016). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2018). Yogyakarta: Pustaka Mahardika.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara